

SISTEM PEREKONOMIAN

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan anda dapat memahami sistem-sistem ekonomi, dan secara khusus diharapkan dapat :

1. Menjelaskan arti sistem ekonomi
2. Menjelaskan karakteristik sistem ekonomi kapitalis
3. Menjelaskan karakteristik sistem ekonomi sosialis
4. Menjelaskan karakteristik sistem ekonomi campuran
5. Menjelaskan karakteristik sistem ekonomi Indonesia

A. Pengertian Sistem Ekonomi

Seperti telah disinggung dalam modul 1, untuk mengatasi masalah ekonomi yang bersifat fundamental (what, how dan for whom) setiap masyarakat mempunyai cara yang berbeda dalam memecahkannya sesuai dengan sistem ekonomi yang dianutnya.

Cara suatu masyarakat mengatur kehidupannya disebut sistem ekonomi atau tata ekonomi. Ada pula yang mengartikan bahwa sistem ekonomi itu merupakan keseluruhan lembaga ekonomi yang dilaksanakan atau dipergunakan oleh suatu bangsa atau negara dalam melakukan kegiatan ekonominya. **Lembaga ekonomi** yang dimaksudkan di sini adalah berupa **pedoman, aturan atau kaidah yang dipergunakan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi** (produksi, distribusi dan konsumsi). Lembaga ekonomi tersebut ada yang bersifat tertulis seperti undang-undang, peraturan pemerintah, instruksi presiden, dsb. Ada pula yang bersifat tidak tertulis seperti kebiasaan, adat-istiadat, cara-cara yang biasa dilakukan suatu masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Jadi, perangkat kelembagaan ini meliputi cara kerja,

mekanisme hubungan hukum, peraturan-peraturan perekonomian, dan norma-norma lain yang tertulis maupun tidak tertulis yang berkaitan dengan kegiatan ekonominya.

Suatu sistem ekonomi tidaklah berdiri sendiri, sebab berkaitan dengan falsafah atau pandangan hidup masyarakatnya. Sebuah sistem ekonomi sesungguhnya merupakan salah satu unsur saja dalam sistem kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, sistem ekonomi merupakan bagian dari kesatuan ideologi kehidupan bermasyarakat pada suatu negara atau bangsa.

Sistem ekonomi yang dianut suatu negara biasanya bersifat khas. Untuk membedakannya dengan sistem ekonomi yang diterapkan oleh negara lain, bisa digunakan sudut pandangan yang menyangkut :

1. Sistem pemilikan sumber daya atau faktor-faktor produksi
2. Kebebasan masyarakat untuk saling berkompetisi satu sama lain
3. Peranan pemerintah dalam mengatur kehidupan ekonomi

B.Sistem Ekonomi Kapitalis

Sistem ekonomi kapitalis atau juga disebut sistem ekonomi liberal adalah suatu **sistem ekonomi yang kehidupan ekonomi masyarakatnya sangat dipengaruhi atau dikuasai oleh pemilik-pemilik modal (kapital)**. Sistem ini mula-mula berkembang di Inggris pada pertengahan abad ke 18, setelah Adam Smith yang dikenal sebagai Bapak Ilmu Ekonomi menerbitkan buku “ The Wealth of Nations “ .

Adam Smith mempunyai pandangan bahwa kepentingan pribadi merupakan kekuatan pengendali kehidupan ekonomi yang akan berjalan ke arah kemakmuran bangsa. Jika setiap orang diberi kebebasan, semuanya akan berusaha untuk mencapai kemakmuran bagi dirinya sendiri. Tidak akan ada orang menghendaki kemiskinan atau

kesengsaraan bagi dirinya sendiri. Dengan demikian jika setiap individu sudah makmur, maka seluruh masyarakat akan makmur, sebab masyarakat tidak lain merupakan kumpulan individu.

Kebebasan yang dimaksudkan Adam Smith, antara lain mencakup kebebasan menjalankan usaha, kebebasan memiliki alat-alat produksi, kebebasan menetapkan harga, kebebasan untuk mengadakan persaingan, kebebasan mengadakan perundingan. Dengan adanya kebebasan ini diharapkan adanya dorongan bagi setiap individu untuk bekerja lebih giat, berlomba ke arah kemajuan ekonomi, sehingga kemakmuran dapat ditingkatkan.

. Semboyan kaum liberal adalah “ **laissez faire** “ artinya biarkanlah. Semboyan ini mempunyai makna “ biarkanlah mereka melakukan pekerjaan yang sesuai dengan keinginan mereka, biarkanlah produksi dan harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran di pasar bebas, tanpa adanya campur tangan pemerintah “. Tugas pemerintah adalah **menjaga keamanan, menegakkan hukum**, dan menyelenggarakan **pekerjaan umum**.

Sistem ekonomi kapitalis (liberal) tersebut memiliki ciri-ciri pokok sebagai berikut.

1. Pemilikan alat-alat produksi seperti tanah, pabrik, mesin-mesin oleh pihak swasta baik perseorangan maupun perusahaan. Setiap orang memiliki kebebasan memiliki alat-alat produksi.
2. Adanya kebebasan berusaha dan bersaing. Setiap orang bebas memilih lapangan pekerjaannya (mendirikan perusahaan), dan bebas bersaing dengan cara apapun.

Produksi dilaksanakan oleh para pengusaha swasta atas prakarsa dan tanggung jawabnya sendiri.

3. Para produsen bebas menentukan apa dan berapa yang akan diproduksi, didorong oleh motif mencari keuntungan sebesar-besarnya.
4. Harga-harga dibentuk di pasar bebas yang ditentukan oleh pertemuan antara permintaan dan penawaran.
5. Campur tangan pemerintah dalam kehidupan ekonomi tidak dibenarkan.

Dalam kenyataannya kebebasan yang dikehendaki oleh kaum kapitalis, selain telah membawa kemajuan ekonomi yang pesat (industri dan perdagangan), juga telah mengakibatkan kesengsaraan bagi banyak orang. Sistem ekonomi ini ternyata memiliki keburukan-keburukan :

1. Konsentrasi (pemusatan) kekuasaan ekonomi pada kelompok tertentu, sehingga muncul bentuk monopoli. Tidak selalu mekanisme pasar itu merupakan suatu sistem pasar persaingan sempurna, di mana harga ditentukan oleh permintaan pembeli dan penawaran penjual yang banyak jumlahnya. Dalam kenyataannya satu atau beberapa perusahaan raksasa menguasai pasar. Mereka memiliki kekuasaan yang sangat besar di dalam menentukan harga, dan menentukan jumlah dan jumlah barang yang ditawarkan. Mereka selalu membatasi produksi pada tingkat di mana mereka akan memperoleh keuntungan maksimum.
2. Ketimpangan atau ketidakmerataan dalam pembagian pendapatan, sehingga memperlebar jurang antara kelompok kaya dan kelompok miskin. Kebebasan yang tidak ada batasnya dalam kegiatan ekonomi merugikan golongan yang lemah, sebab mereka akan kalah bersaing. Perusahaan besar bersaing dengan perusahaan kecil,

sehingga akhirnya menimbulkan semacam “ kanibalisme “. Kekayaan makin bertambah pada golongan yang kuat, sedangkan, sementara golongan yang lemah akan jatuh miskin, yakni para pengusaha kecil dan kaum buruh.

3. Kehidupan ekonomi sering tidak stabil, adanya gelombang konjungtur. Mekanisme pasar bebas menyebabkan perekonomian selalu mengalami fluktuasi yang tidak teratur. Pada suatu masa tertentu akan mengalami kemakmuran yang tinggi, tetapi pada masa berikutnya akan mengalami kemerosotan yang luar biasa. Para pengusaha dapat memperoleh keuntungan yang banyak secara mendadak di suatu saat, dan mengalami kehancuran pada masa berikutnya. Demikian pula inflasi dapat tiba-tiba muncul, dan pengangguran yang tinggi dapat muncul pada masa berikutnya. Ketidakstabilan ekonomi seperti ini sangat merugikan masyarakat banyak.

C.Sistem Ekonomi Sosialis

Kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam sistem ekonomi kapitalis, telah menyebabkan munculnya paham baru yang menentang paham tersebut. Paham baru ini dikenal dengan sistem ekonomi sosialis atau sistem ekonomi terpimpin. Sistem ekonomi sosialis merupakan suatu **sistem ekonomi di mana sebagian besar barang-barang modal/faktor-faktor produksi, dikuasai oleh negara yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai keseluruhan.**

Berbeda dengan kapitalisme yang menitik beratkan pada pandangan hidup individualisme, sosialisme menitik beratkan pada pandangan **kolektivisme**. Kolektivisme adalah pandangan yang mengajarkan bahwa di samping setiap orang sebagai warga masyarakat, masyarakat sebagai keseluruhan merupakan satuan tersendiri yang

mempunyai kepentingan yang hendaknya dipenuhi terlebih dahulu daripada kepentingan perseorangan.

Ciri-ciri sistem ekonomi sosialis tersebut antara lain :

1. Semua alat-alat produksi (tanah, mesin-mesin, pabrik) produksi dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah/negara. Tidak ada hak milik pribadi atas alat-alat produksi.
2. Seluruh kegiatan produksi dilakukan oleh negara. Tidak ada usaha swasta, semua perusahaan adalah perusahaan negara.
3. Jumlah dan jenis barang yang harus diproduksi ditentukan oleh Badan Perencana Ekonomi Pusat yang dibentuk pemerintah.
4. Harga dan distribusi barang ditentukan dan dikendalikan oleh pemerintah.
5. Semua warga masyarakat adalah tenaga kerja/karyawan yang wajib ikut berproduksi sesuai dengan kemampuannya, yang kemudian diberi upah/gaji oleh negara sesuai dengan kebutuhannya.

Sistem ekonomi ini dipraktekkan di negara-negara komunis, di mana pemerintah sepenuhnya menentukan corak kegiatan ekonomi yang akan dilakukan. Perencanaan dilakukan meliputi hampir semua aspek kehidupan ekonomi. Karena itu, sistem ini sering juga disebut ekonomi komando (command economy) atau sistem ekonomi yang diatur oleh perintah dari pusat.

Sekalipun sistem ekonomi ini dapat lebih menjamin adanya pemerataan pembagian pendapatan, namun sistem ekonomi ini telah mengorbankan kemerdekaan manusia secara pribadi. Hak milik pribadi atas alat-alat produksi tidak ada, sehingga menyebabkan kurangnya dorongan untuk bekerja secara produktif.

D.Sistem Ekonomi Campuran

Dalam kenyataannya, kedua bentuk sistem ekonomi tersebut (kapitalis maupun sosialis), tidak ada yang murni, yang ada adalah bentuk campuran dari kedua sistem tersebut. Dalam sistem ekonomi campuran, pemerintah ikut campur dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Namun demikian, campur tangan tersebut tidak menghapus kegiatan ekonomi yang diselenggarakan oleh pihak swasta. Sistem ekonomi campuran yang diterapkan oleh banyak negara tidak selalu sama. Ada yang kadar kapitalismenya lebih tinggi seperti Amerika Serikat, Hongkong, Singapura. Ada pula yang bobot sosialismenya lebih besar seperti India. Untuk mengetahui apakah suatu negara condong ke arah sistem ekonomi liberal atau sebaliknya, terdapat ukuran yang disebut “ indeks kebebasan ekonomi “ yang dikembangkan oleh Milton Friedman dkk yang tergabung dalam “ Economic Freedom Network “. Indeks ini dibangun atas 17 komponen, diantaranya menyangkut aspek operasi (campur tangan) pemerintah dan struktur ekonomi. Skala indeks bergerak dari 0 sampai 10. Negara dengan indeks lebih tinggi menunjukkan konsistensi yang kuat pada sistem ekonomi liberal. Dengan menggunakan indeks kebebasan ekonomi dari Milton Friedman, sistem ekonomi yang paling liberal di dunia adalah Hongkong (9,3), disusul oleh Singapura (8,2), Selandia Baru (8,0) dan Amerika Serikat (7,6). Sementara itu di tingkat ASEAN, tercatat Thailand (7,2), Filipina (7,0), Malaysia (7,0), Indonesia (6,3). Perekonomian Indonesia dalam kurun waktu 1975 – 1995 tampak semakin liberal dengan bergerakinya indeks kebebasan ekonomi dari 5,2 pada tahun 1975 menjadi 6,3 pada tahun 1995. Apakah negara dengan indeks kebebasan ekonomi yang tinggi menunjukkan pertumbuhan yang baik dalam perekonomiannya ? Secara empirik terbukti bahwa memang ada korelasi positif antara kebebasan ekonomi

dengan pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi. Studi yang dilakukan oleh Liberal Institut pada tahun 1997 menunjukkan bahwa selama kurun 1985 – 1996, pendapatan per kapita di negara-negara yang perekonomiannya sangat bebas mencapai US \$ 14.829, sedangkan di negara yang kurang bebas mencapai US \$ 12.369, dan di negara yang paling kurang bebas hanya mencapai US \$ 2.541. Demikian pula dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Di negara-negara yang yang perekonomiannya sangat bebas, tingkat pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 2,9 % per tahun, sedangkan di negara yang perekonomiannya kurang bebas mencapai 1,8 % per tahun, dan di negara yang paling kurang bebas, tingkat pertumbuhan ekonomi hanya 1,0 % per tahun. Sayangnya hasil studi ini tidak melaporkan bagaimana hubungan kebebasan ekonomi dengan pemerataan tingkat kesejahteraan.

Dalam sistem ekonomi campuran, pemerintah dapat mengatur, mengawasi, menstabilkan dan memajukan ekonomi nasional secara keseluruhan, dengan mendorong atau menumbuhkan inisiatif swasta. Namun, yang masih menjadi persoalan adalah : bagaimana sebaiknya cara yang ditempuh pemerintah dan apakah campur tangan pemerintah tersebut harus bersifat langsung atau tidak langsung, apakah cukup dengan peraturan saja ?

Secara garis besar, keterlibatan pemerintah dalam kehidupan ekonomi, dapat dibedakan dalam tiga bentuk :

1. Membuat peraturan-peraturan, dengan tujuan pokok agar kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi berjalan secara wajar dan tidak merugikan masyarakat. Misalnya, peraturan mengenai upah minimum ditetapkan agar para pekerja diberikan upah yang wajar dan layak sehingga dapat mencukupi berbagai

kebutuhan yang pokok. Peraturan mengenai lokasi pengembangan dibuat, agar industri-industri yang didirikan tidak mengganggu masyarakat di sekitarnya dengan berbagai polusi (pencemaran) yang dihasilkannya.

2. Menjalankan berbagai kebijaksanaan ekonomi, antara lain kebijaksanaan fiskal dan moneter. Uraian tentang berbagai kebijaksanaan ekonomi ini bisa dibaca dalam modul 6 .
3. Secara langsung menjalankan berbagai kegiatan ekonomi, sehingga dapat memaksimumkan keuntungan sosial (keuntungan yang diperoleh masyarakat secara keseluruhan). Kegiatan ekonomi yang dilakukan pihak swasta pada umumnya dapat menghasilkan keuntungan yang besar sekali bagi individu yang bersangkutan (keuntungan perseorangan). Akan tetapi, masyarakat belum tentu mendapat keuntungan, bahkan mengalami kerugian, akibat tindakan individu yang bersangkutan, misalnya dengan menetapkan harga yang tidak wajar. Karena itulah pemerintah ikut campur secara langsung, dengan mendirikan perusahaan-perusahaan negara untuk bidang-bidang yang vital dan berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Ikut campur pemerintah tersebut, diharapkan dapat memaksimumkan keuntungan sosial.

E.Sistem Ekonomi Indonesia

Seperti dikemukakan oleh Atje Partadiredja (1983), seorang pakar ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, sebagian besar negara-negara sedang berkembang, termasuk Indonesia, menganut sistem ekonomi campuran. Terdapat pemilikan swasta perseorangan atas alat-alat produksi yang berdampingan dengan pemilikan negara, dan bahkan pemilikan kelompok-kelompok persekutuan adat. Mekanisme harga dan pasar

bebas, hidup berdampingan dengan perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah. Sebagian besar harga barang dan jasa dan faktor produksi ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Pemerintah juga mempengaruhi kekuatan permintaan dan penawaran tersebut melalui kebijaksanaan harga, termasuk penetapan upah minimum.

Mengenai turut campurnya pemerintah dalam kehidupan ekonomi, dapat dilihat ketentuan pada ayat 2 dan 3 pasal 33 UUD 1945. Ayat 2 tersebut berbunyi “ Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara “. Menurut Mohammad Hatta, yang merumuskan pasal 33 tersebut, dikuasai oleh negara tidak berarti negara sendiri yang menjadi pengusaha, usahawan atau ondernemer. Selanjutnya dikatakan bahwa kekuasaan negara terdapat pada membuat peraturan-peraturan guna kelancaran jalan ekonomi, peraturan yang melarang penghisapan orang lemah oleh orang yang bermodal. Demikian pula negara mempunyai kewajiban supaya ketentuan yang termuat pada pasal 27 ayat 2 dapat terlaksana. Ketentuan itu berbunyi “ tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan “.

Dalam dokumen GBHN pada masa Orde Baru, sistem ekonomi Indonesia dinamakan sebagai demokrasi ekonomi yang memiliki ciri-ciri positif sebagai berikut.

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan memenuhi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

4. Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan permufakatan Lembaga-lembaga Perwakilan Rakyat serta pengawasan terhadap kebijakannya ada pada Lembaga-lembaga Perwakilan Rakyat pula
5. Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak.
6. Hak milik perorangan diakui sedangkan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
7. Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.
8. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara

Sebaliknya dalam demokrasi ekonomi harus dihindarkan timbulnya ciri-ciri negatif berikut ini.

1. Sistem free fight liberalism yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain yang dalam sejarahnya di Indonesia telah menimbulkan dan mempertahankan kelemahan struktural posisi Indonesia dalam ekonomi dunia.
2. Sistem etatisme dalam mana negara beserta aparatur ekonomi negara mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara.
3. Pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.

Pada dekade 1980-an terdapat suatu polemik dari para pakar ekonomi tentang sistem ekonomi yang diinginkan (ideal) untuk masyarakat Indonesia. Sistem ekonomi tersebut kemudian dinamai Sistem Perekonomian Pancasila (SPP). Menurut Mubyarto,

salah seorang penggagasnya, Sistem Perekonomian Pancasila tersebut memiliki 5 ciri pokok sebagai berikut.

1. Koperasi sebagai soko guru perekonomian, karena koperasi merupakan bentuk yang paling kongkrit dari sebuah usaha bersama.
2. Roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomis, sosial dan moral. Rangsangan (dorongan) sosial dan moral ini sangat ditekankan, karena rangsangan-rangsangan inilah yang membedakan Sistem Perekonomian Pancasila dengan sistem ekonomi kapitalis yang menekankan rangsangan ekonomi semata.
3. Adanya kehendak kuat dari seluruh masyarakat ke arah pemerataan sosial. Hal ini berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis yang hanya punya rasa individual dalam mencari keuntungan yang sebesar-besarnya bagi dirinya dalam kegiatan ekonomi.
4. Nasionalisme menjiwai setiap kebijakan ekonomi
5. Adanya keseimbangan yang jelas antara perencanaan di tingkat nasional dengan desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi.

TUGAS MANDIRI

Setelah mempelajari modul 5 tentang sistem perekonomian, kerjakanlah soal-soal berikut ini.

1. Bandingkan sistem demokrasi ekonomi dengan sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Jelaskan keunggulannya !
2. Sebelum krisis ekonomi terjadi pada tahun 1997-1998, sebuah lembaga penelitian pernah melaporkan data sebagai berikut. 200 orang konglomerat di Indonesia menguasai lebih dari 90 % aset produktif (sumber daya modal, manusia, teknologi, akses pasar dan kedekatan dengan penguasa/birokrasi. Sumbangan usaha mereka terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 60%. Sementara itu 40 juta pengusaha menengah kecil dan koperasi hanya menguasai kurang dari 10 % aset produktif. Sumbangan usaha koperasi terhadap PDB hanya sekitar 7 %.

Menurut pendapat anda apakah ketimpangan seperti ini ada kaitannya dengan sistem ekonomi yang dipraktekkan di Indoensia ? Jelaskan !

MODUL 6

KEBIJAKSANAAN EKONOMI

Setelah mempelajari modul 6 ini, anda diharapkan dapat memahami tentang kebijaksanaan ekonomi, dan secara khusus diharapkan dapat :

1. Mendefinisikan kebijaksanaan ekonomi
2. Menjelaskan kebijaksanaan harga dan upah
3. Menjelaskan kebijaksanaan produksi
4. Menjelaskan kebijaksanaan perdagangan
5. Menjelaskan kebijaksanaan sosial
6. Menjelaskan kebijaksanaan kesempatan kerja
7. Menjelaskan kebijaksanaan moneter
8. Menjelaskan kebijaksanaan keuangan negara dan fiskal
9. Menjelaskan kebijaksanaan industrialisasi

A.Pengertian Kebijakan Ekonomi

Dalam modul 5 telah disinggung bahwa turut campurnya pemerintah dalam sistem ekonomi suatu negara antara lain dilakukan melalui kebijaksanaan ekonomi. Kebijakan (policy) atau kebijakan secara umum memiliki makna sebagai suatu tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan instrumen tertentu.

Berkaitan dengan kebijaksanaan ekonomi atau sering pula disebut politik ekonomi, menurut van der Valk, kebijaksanaan tersebut memiliki makna “ keseluruhan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang bertujuan untuk mempengaruhi

kehidupan ekonomi secara langsung, dengan satu atau lain cara “ Sejalan dengan pendapat ini, Herbert Giersch, mengemukakan pula bahwa yang maksud kebijaksanaan ekonomi adalah “ semua usaha, perbuatan dan tindakan dengan maksud mengatur, mempengaruhi atau langsung menetapkan jalannya kejadian-kejadian ekonomi di dalam suatu daerah atau wilayah “

Jadi, kebijaksanaan ekonomi ini merupakan campur tangan/intervensi pemerintah dalam kehidupan ekonomi. Sampai berapa jauh campur tangan dalam kehidupan ekonomi merupakan persoalan dari pemerintah masing-masing sesuai dengan sistem ekonomi yang dianutnya.

B. Unsur-unsur Kebijakan Ekonomi

Kebijaksanaan ekonomi mencakup aspek yang luas, mencakup seluruh bidang kehidupan ekonomi. Namun untuk sekedar membatasi diri, akan dikemukakan unsur-unsur atau bidang-bidang kebijaksanaan ekonomi sebagai berikut.

1. Kebijakan harga dan upah
 2. Kebijakan produksi
 3. Kebijakan perdagangan
 4. Kebijakan sosial
 5. Kebijakan kesempatan kerja
 6. Kebijakan moneter
 7. Kebijakan keuangan negara dan fiskal
 8. Kebijakan industrialisasi
- **Kebijakan harga dan upah**

Kebijaksanaan harga dan upah (upah pada hakekatnya merupakan harga tenaga kerja), bertujuan untuk mempengaruhi atau mengatur harga-harga dengan cara tertentu. Berati pula bahwa hal tersebut merupakan usaha untuk mempengaruhi bekerjanya mekanisme harga.

Pemerintah dapat turut campur tangan secara langsung dengan menetapkan tingkat harga dan upah. Untuk melindungi konsumen ditetapkan **harga maksimum**, sedangkan untuk melindungi produsen ditetapkan **harga minimum** (biasanya diterapkan dalam bidang pertanian). Sementara itu untuk melindungi para pekerja ditetapkan **upah minimum**, agar dapat memenuhi standar kebutuhan hidup minimum yang layak. Di Indonesia, penetapan harga maksimum sering dikenal Harga Eceran Tertinggi (HET), sedangkan untuk upah dikenal pula penetapan Upah Minimum Regional (UMR).

Penetapan harga-harga oleh pemerintah biasanya disertai pula tindakan-tindakan lainnya. Misalnya, dalam keadaan inflasi, pemerintah menetapkan harga maksimum untuk barang-barang kebutuhan pokok, harus disertai pula dengan tindakan distribusi bahan pokok untuk menambah stok bahan pokok di pasaran.

- **Kebijaksanaan produksi**

Kebijaksanaan produksi dapat diartikan sebagai tindakan-tindakan pengaturan pemerintah dalam bidang produksi. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam kenyataan kehidupan ekonomi, permintaan dan penawaran untuk barang dan jasa jarang mencapai keseimbangan. Untuk mengatasi ketidak-seimbangan dalam permintaan dan penawaran, maka pemerintah dapat melakukan tindakan-tindakan yang langsung mempengaruhi produksi. Dalam hal ini van der Valk mengemukakan berberapa contoh tindakan pemerintah dalam mengatur produksi.

- a. larangan untuk mendirikan perusahaan baru
- b. penetapan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendirikan perusahaan tertentu, termasuk perizinannya.

Di Amerika Serikat pernah diberlakukan kebijakan untuk membatasi hasil produksi pertanian tertentu dengan memberikan subsidi kepada para petani agar tidak menanam. Sementara itu di Indonesia, untuk meningkatkan produksi hasil pertanian, pernah diberlakukan kebijaksanaan Inmas dan Bimas.

- **Kebijaksanaan perdagangan**

Kebijaksanaan perdagangan merupakan tindakan-tindakan pemerintah yang ditujukan untuk melindungi pasar dalam negeri dari saingannya di luar negeri. Karena itu dikenal adanya kebijaksanaan **proteksi**, yang terdiri dari tindakan-tindakan yang bertujuan untuk membatasi import dan memajukan ekspor guna melindungi industri nasional dari persaingannya dengan industri di luar negeri. Instrumen-instrumennya antara lain : bea import, lisensi import, kuota import, subsidi ekspor, dsb.

- **Kebijaksanaan sosial**

Kebijaksanaan sosial adalah kebijaksanaan yang dijalankan oleh pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi ketegangan-ketegangan yang disebabkan tidak meratanya pembagian pendapatan diantara berbagai golongan penduduk. Ketegangan-ketegangan ini muncul dalam bentuk kecemburuan sosial. Menurut van der Valk, kebijaksanaan sosial ini antara lain dalam bentuk :

- a. usaha menaggulangi pengangguran melalui penciptaan kesempatan kerja
- b. memberikan tunjangan kepada para penganggur
- c. pemberian jaminan sosial terhadap mereka yang mengalami kecelakaan

d. distribusi berbagai bahan kebutuhan , disertai dengan kebijaksanaan penetapan harga maksimum.

- **Kebijaksanaan kesempatan kerja.**

Kebijaksanaan kesempatan kerja merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah yang ditujukan ke arah memperbesar kesempatan kerja yang ada. Problema yang dialami banyak negara sedang berkembang, termasuk Indonesia adalah kurangnya kesempatan kerja. Seperti kita ketahui bahwa pertumbuhan angkatan kerja di Indonesia relatif cepat. Jumlah angkatan kerja tumbuh lebih cepat daripada jumlah penduduk, sebab dalam struktur kependudukan didominasi oleh penduduk usia muda. Hal ini akan memberikan beban bagi perekonomian, yakni penciptaan dan perluasan kesempatan kerja. Jika lowongan kerja baru tidak mampu menampung semua angkatan kerja baru, maka sebagian angkatan kerja baru ini akan menjadi pengangguran. Karena itu, penciptaan lapangan kerja baru merupakan salah satu masalah yang strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia.

- **Kebijaksanaan moneter**

Kebijaksanaan moneter merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah yang ditujukan untuk menjaga stabilitas nilai mata uang negara yang bersangkutan, melalui penambahan atau pengurangan penawaran (jumlah) uang yang beredar. Kebijakan moneter dilakukan melalui instrumen-instrumen antara lain : kebijakan tingkat suku bunga (politik diskonto), kebijakan pasar terbuka, dan kebijakan perkreditan.

Politik diskonto adalah kebijaksanaan pemerintah/Bank Sentral suatu negara dalam hal menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga. Menaikkan suku bunga biasanya dilakukan pada masa inflasi untuk mengurangi jumlah uang beredar. Bila

tingkat suku bunga kredit dinaikkan, arus pinjaman akan menurun dan mungkin juga akan berhenti, sehingga akan mengurangi jumlah uang beredar. Kemudian bila tingkat suku bunga tabungan dinaikkan, maka banyak orang akan menyimpan uangnya di bank, sehingga jumlah uang beredar berkurang.

Politik pasar terbuka adalah kebijaksanaan Bank Sentral suatu negara dalam memperjual belikan surat-surat berharga untuk mengendalikan jumlah uang beredar. Di Indonesia, surat berharga yang dikeluarkan Bank Indonesia antara lain Sertifikat Bank Indonesia (SBI), obligasi. Dalam masa inflasi, Bank Sentral memperbanyak penjualan surat-surat berharga tersebut (masyarakat melakukan pembelian surat berharga) sehingga jumlah uang beredar di masyarakat akan berkurang.

Kebijaksanaan perkreditan berkaitan dengan pengendalian kredit secara kuantitatif (pembatasan jumlah kredit), dan pengawasan kredit secara selektif, yaitu jenis kredit mana yang harus dikurangi dan jenis kredit mana yang perlu dikembangkan.

- **Kebijaksanaan keuangan negara dan fiskal.**

Kebijaksanaan keuangan negara berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran negara. Penerimaan dan pengeluaran negara dapat dipelajari pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Terdapat tiga kebijaksanaan yang menyangkut anggaran ini yaitu :

- a. Anggaran berimbang (balanced budget), dimana jumlah perimaan negara sama dengan jumlah pengeluarannya.
- b. Anggaran surplus, dimana jumlah penerimaan negara lebih besar daripada pengeluarannya.

- c. Anggaran defisit, dimana jumlah penerimaan negara lebih sedikit daripada pengeluarannya.

Anggaran mana yang seharusnya digunakan, tergantung pada keadaan ekonomi yang dihadapi. Dalam keadaan deflasi biasanya dipergunakan anggaran defisit, dalam keadaan inflasi dipergunakan anggaran surplus, sedangkan dalam keadaan normal dipergunakan anggaran berimbang.

Kebijaksanaan fiskal ini merupakan bagian dari kebijaksanaan keuangan negara yang berkaitan dengan masalah **pajak**. Dalam hal ini, pajak selain sebagai salah satu sumber penerimaan negara (fungsi budgetair), juga berfungsi sebagai pengatur. Dalam fungsinya sebagai pengatur, dilakukan dengan cara :

- a. pemberian keringanan pajak, terhadap sektor-sektor produksi yang perlu ditingkatkan, bahkan diberikan pembebasan pajak yang bersifat sementara (tax holiday).
- b. pemberian pengecualian, terhadap lembaga-lembaga sosial. Lembaga sosial, termasuk juga lembaga pendidikan ini tidak dikenakan pajak.
- c. pemberatan-pemberatan. Terhadap barang-barang yang tidak dikehendaki peredarannya dalam masyarakat seperti minuman keras, rokok, dikenakan pajak yang tinggi

- **Kebijaksanaan industrialisasi**

Kebijaksanaan industrialisasi adalah tindakan-tindakan pemerintah untuk memberi arah kepada industri-industri yang sudah ada dan yang akan didirikan. Dalam hal ini ada dua jenis kebijaksanaan yang lazim ditempuh pemerintah : kebijaksanaan substitusi impor dan kebijaksanaan promosi ekspor.

Kebijaksanaan substitusi impor merupakan strategi industrialisasi yang mengutamakan pengembangan jenis-jenis industri untuk menggantikan kebutuhan akan impor produk-produk sejenis. Untuk memungkinkan tumbuh besar, industri-industri yang masih bayi (infant industry) biasanya dilindungi oleh pemerintah dari persaingannya dengan produk-produk impor.

Kebijaksanaan promosi ekspor, ialah strategi industrialisasi yang mengutamakan pengembangan jenis-jenis industri yang menghasilkan produk-produk untuk diekspor.

TUGAS MANDIRI

Setelah mempelajari modul 6 tentang kebijaksanaan ekonomi, kerjakanlah soal-soal berikut ini.

1. Untuk mengatasi krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997-1998, pemerintah Indonesia telah memberlakukan kebijaksanaan moneter. Jelaskan beberapa kebijaksanaan yang telah diambil pemerintah tersebut !
2. Tantangan yang dialami oleh pemerintah Indonesia dewasa ini adalah masalah pengangguran yang jumlahnya sangat fantastis, yakni seperlima dari jumlah penduduk Indonesia. Menurut anda kebijaksanaan apa yang harus dilakukan pemerintah ? Jelaskan !

MODUL 7

PERTUMBUHAN EKONOMI

Setelah mempelajari modul 7 ini, diharapkan anda dapat memahami pertumbuhan ekonomi, dan secara khusus diharapkan dapat :

1. Mendefinisikan pertumbuhan ekonomi
2. Menjelaskan karakteristik negara sedang berkembang
3. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi
4. Menjelaskan teori-teori pertumbuhan ekonomi
5. Menjelaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia

1. Pengertian Pembangunan/ Pertumbuhan Ekonomi

Ada tiga istilah yang sering digunakan untuk arti yang bersamaan, yakni pembangunan ekonomi, perkembangan ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi. Sesungguhnya pembangunan ekonomi memiliki arti yang lebih luas, sebab mencakup perkembangan ekonomi maupun pertumbuhan ekonomi. Namun, kebanyakan penulis sering menggunakan secara bergantian dengan makna yang sama. Pertumbuhan ekonomi lazimnya didefinisikan sebagai “ suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang ” (Sukirno,1981:13). Definisi ini memiliki tiga unsur : (1) suatu proses, yang berarti merupakan perubahan yang terus menerus, (2) usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita, (3) kenaikan pendapatan perkapita tersebut berlangsung dalam jangka panjang.

Definisi tersebut bertahan cukup lama sejak kelahiran Ilmu Ekonomi Pembangunan sebagai cabang Ilmu Ekonomi yang mulai dikembangkan setelah Perang

Dunia II. Ekonomi Pembangunan bertujuan menganalisis masalah-masalah yang dihadapi oleh negara-negara sedang berkembang dan menemukan cara-cara untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, supaya negara-negara sedang berkembang dapat membangun ekonominya lebih cepat lagi.

Kenyataan menunjukkan bahwa kenaikan pendapatan per kapita belum bisa memecahkan masalah-masalah pokok negara sedang berkembang yang pada umumnya terperangkap dalam keterbelakangan/kemiskinan. Jika pendapatan per kapita naik, tetapi jumlah penduduk miskin tidak berkurang dan bahkan bertambah, maka ada sesuatu yang tidak beres mengenai distribusi pendapatan. Artinya, terdapat jurang antara yang kaya dengan yang miskin, dimana sebagian besar pendapatan diambil oleh sebagian kecil orang.

Atas dasar kenyataan demikian, maka pada dekade 1970-an, telah dilakukan redefinisi pertumbuhan ekonomi. Pembangunan atau pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai “ **proses pengurangan atau penghapusan kemiskinan, kepincangan distribusi pendapatan dan pengangguran** ” atau “ the reduction or elimination of poverty, inequality and unemployment within the context of a growing economy ” (Partadiredja, 1993: 212). Kemudian sejak terjadinya krisis energi tahun 1973, timbul gagasan untuk memasukkan unsur **percaya diri** atau **berdiri di atas kaki sendiri** ke dalam pengertian pembangunan. Berdiri di atas kaki sendiri (self reliance) berarti pengurangan ketergantungan pada kebutuhan pokok yang di impor, meliputi bahan makanan, minyak bumi, modal dan keahlian.

Dengan demikian setiap proses pertumbuhan ekonomi harus mengandung unsur-unsur : (1) peningkatan pendapatan nasional, (2) peningkatan pendapatan per kapita, (3)

pemberantasan kemiskinan, (4) pemerataan pendapatan, (5) pemberantasan pengangguran, (6) pengurangan ketergantungan pada bahan pokok yang diimport.

2.Karakteristik Negara Sedang Berkembang

Seperti telah dikemukakan di atas, bahwa fokus pembahasan dari analisa ekonomi pembangunan adalah masalah pembangunan di negara-negara sedang berkembang (developing countries). Negara sedang berkembang memiliki karakteristik atau ciri-ciri sebagai berikut.

a.Taraf hidup yang rendah

Pada umumnya sebagian besar penduduk di negara sedang berkembang taraf hidupnya rendah, yang dapat dilihat dari tingkat pendapatan yang rendah, perumahan yang tidak memenuhi syarat, kesehatan dan gizi yang buruk, tingkat pendidikan yang rendah, tingkat kematian bayi yang tinggi, dan tingkat harapan hidup yang pendek.

b.Produktivitas yang rendah

Rendahnya produktivitas (kemampuan berproduksi) tenaga kerja antara lain disebabkan buruknya kesehatan, tingkat gizi yang rendah, tingkat pendidikan yang rendah, kurang disiplin, kurangnya peralatan. Rendahnya produktivitas ini mengakibatkan lambatnya laju pembangunan.

c.Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi

Pada umumnya negara yang sedang berkembang mengalami laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, yakni sekitar 2,5 % per tahun. Perumbuhan penduduk yang tinggi ini menimbulkan akibat yang negatif terhadap pembangunan, yakni pengangguran yang berlebihan, tingkat pendapatan per kapita yang rendah.

d.Tingkat pengangguran yang tinggi

Tingkat pengangguran yang tinggi di negara-negara sedang berkembang dapat dicari sebabnya pada permintaan dan penawaran tenaga kerja. Dari sisi permintaan, permintaan tenaga kerja ini tidak berjalan secepat pertumbuhan ekonomi. Kelambatan permintaan akan tenaga kerja ini disebabkan proyek pembangunan, terutama di sektor industri bersifat padat modal yang kurang menyerap tenaga kerja. Dari segi penawaran, mutu dan kualifikasi tenaga kerja seringkali tidak memenuhi keperluan pembangunan. Tenaga kerja ini umumnya tidak terdidik, tidak terlatih dan tidak terampil.

e. Memiliki sumber-sumber alam yang belum banyak diolah

Di negara-negara sedang berkembang, sumber-sumber alam belum banyak diolah, sehingga masih bersifat potensial. Hal ini disebabkan kekurangan modal, tenaga ahli dan entrepreneur.

f. Kekurangan modal

Dalam hal pembentukan modal, negara sedang berkembang mengalami lingkaran yang tidak berujung pangkal (*vicious circle*), baik dari segi penawaran maupun dari segi permintaan. Penawaran modal dipengaruhi kesanggupan untuk menabung, sedangkan permintaan modal dipengaruhi oleh daya tarik untuk menanam modal (*investasi*).

Dari segi penawaran, terdapat kemampuan yang rendah untuk menabung, sebagai akibat dari tingkat pendapatan yang rendah. Tingkat pendapatan yang rendah ini disebabkan oleh produktivitas yang rendah. Produktivitas yang rendah ini sebagai akibat dari kekurangan modal. Kekurangan modal merupakan akibat dari rendahnya kemampuan untuk menabung.

Dari segi permintaan, terdapat dorongan yang rendah untuk menanam modal. Hal ini disebabkan daya beli masyarakat yang rendah. Daya beli masyarakat yang rendah disebabkan oleh pendapatan masyarakat yang rendah. Pendapatan yang rendah ini sebagai akibat dari produktivitas yang rendah. Produktivitas yang rendah disebabkan oleh penanaman modal yang rendah. Penanaman modal yang rendah ini sebagai akibat daripada dorongan untuk menanam modal yang rendah pula.

3. Tujuan Pembangunan Ekonomi

Pembangunan/pertumbuhan ekonomi menggambarkan upaya suatu bangsa atau negara dalam meningkatkan kemakmuran mereka dalam bentuk meningkatnya produksi barang dan jasa. Besarnya produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dinamakan produksi nasional atau pendapatan nasional. Semakin besar kemampuan untuk menghasilkan barang dan jasa, makin banyak pula kebutuhan-kebutuhan material yang dapat dipenuhi.

Menurut Michael P. Todaro, tujuan pembangunan yang universal adalah sebagai berikut.

- a. Menambah persediaan dan memperluas distribusi barang keperluan hidup yang pokok seperti makanan, pakaian, perumahan, kesehatan dan perlindungan bagi semua anggota masyarakat.
- b. Menaikkan taraf hidup, termasuk pendapatan yang lebih tinggi, penyediaan lapangan kerja, pendidikan dan perhatian yang lebih banyak pada nilai-nilai kebudayaan dan kemanusiaan. Semua ini tidak hanya akan menaikkan kesejahteraan kebendaan saja, tetapi juga akan menimbulkan harga diri dan kebanggaan nasional.

- c. Memperluas lingkup pilihan ekonomi dan sosial bagi perseorangan dan negara dengan membebaskan mereka dari perbudakan dan ketergantungan, tidak hanya dalam hubungannya dengan orang-orang dan negara-negara lain, tetapi juga dengan kebodohan dan kemiskinan.

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua macam faktor, yakni faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi. Faktor ekonomi terdiri dari : ketersediaan sumber alam, kuantitas dan kualitas SDA, modal dan teknologi. Faktor non-ekonomi antara lain sosial budaya, dan kondisi politik.

Dengan demikian pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh banyak faktor yang kompleks. Jhon Vaizey (1988:32), mengatakan “ secara singkat faktor-faktor ini dapat dikategorikan dalam pertumbuhan tenaga kerja, akumulasi modal dan fisik dan penambahan pada persediaan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat ” Dalam pernyataan Vaizey tersebut, tersurat secara jelas peranan yang diberikan pendidikan, yakni penambahan pada persediaan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki masyarakat.

Sementara itu Bauner (dalam Jhingan,1996:85) berdasarkan hasil penelitiannya, menyimpulkan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi itu adalah “ bakat, kemampuan, kualitas, kapasitas dan kecakapan, sikap, adat-istiadat, motivasi, serta struktur politik.

Dari pendapat Vaizey dan Baurer tersebut, kita dapat melihat betapa “pendidikan” berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, sebab persediaan pengetahuan dan keterampilan sebagaimana yang disebutkan Vaizey, dan kemampuan, kualitas, kapasitas

dan kecakapan, sikap, sebagaimana yang disebutkan Baurer, semuanya dipengaruhi oleh pendidikan, baik pendidikan formal maupun non-formal. Bahkan adat istiadat pun dapat dirubah melalui pendidikan. Lebih lanjut Vaizey (1988:33), mengatakan “ di negara-negara dengan tingkat pendidikan formal yang tinggi, ada suatu kesediaan untuk menerima perubahan dan kesediaan untuk mengembangkan perubahan tersebut ”. Hal ini sangat diperlukan dalam pertumbuhan ekonomi.

5. Teori-teori Pertumbuhan Ekonomi

Seperti dikemukakan Gary S. Becker (1993:323) dalam bukunya “ Human Capital ”, pertumbuhan ekonomi merupakan tantangan intelektual sejak permulaan munculnya analisis ekonomi yang sistematis. Bahkan Adam Smith yang dikenal sebagai Bapak Ilmu Ekonomi, telah mengklaim bahwa pertumbuhan ekonomi sangat berkaitan dengan pembagian kerja (division labor). Pembagian kerja merupakan titik tolak dari teori pertumbuhan ekonomi Adam Smith, yang berkaitan dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja. Kenaikan produktivitas tenaga kerja ini berkaitan dengan : (1) meningkatnya keterampilan pekerja, (2) penghematan waktu dalam memproduksi barang, dan (3) penemuan mesin yang sangat menghemat tenaga. Penyebab yang ketiga ini bukan berasal dari tenaga kerja tetapi dari modal. Dalam hal ini teknologi telah melahirkan pembagian kerja dan perluasan pasar.

Di samping pembagian kerja, Adam Smith menekankan pentingnya memupukan modal, bahkan pemupukan modal ini harus dilakukan lebih dahulu daripada pembagian kerja. Ia menganggap pemupukan modal sebagai suatu syarat mutlak bagi pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian permasalahan pertumbuhan ekonomi secara luas adalah kemampuan manusia untuk lebih banyak menabung dan kemudian menginvestasikannya.

Selain teori Adam Smith, Becker (1993:323), menunjukkan pula bahwa Thomas Malthus telah mengembangkan suatu model formal mengenai proses pertumbuhan yang dinamis. Malthus tidak menganggap proses pertumbuhan ekonomi terjadi dengan sendirinya, bahkan proses pertumbuhan ekonomi memerlukan berbagai usaha yang konsisten dari pihak rakyat (Jhingan,1996:121).

Menurut Malthus, pertumbuhan ekonomi suatu negara sebagian bergantung pada kuantitas produk yang dihasilkan oleh tenaga kerjanya, dan sebagian lagi pada nilai atas kuantitas produk yang dihasilkan oleh tenaga kerjanya, dan sebagian lagi pada nilai atas produk tersebut. Dalam kaitannya dengan pertumbuhan penduduk, Malthus mengatakan bahwa pertumbuhan penduduk tidak bisa terjadi tanpa peningkatan kesejahteraan yang sebanding. Jika tingkat akumulasi modal meningkat, permintaan akan tenaga kerja juga meningkat. Akan tetapi pertumbuhan penduduk saja tidak akan meningkatkan kesejahteraan. Pertumbuhan penduduk akan meningkatkan kesejahteraan bila pertumbuhan tersebut meningkatkan permintaan efektif (effective demand). Peningkatan pada permintaan efektif akan menyebabkan meningkatnya kesejahteraan.

Teori-teori yang telah disebutkan (Adam Smith maupun Malthus), dikategorikan teori klasik. Sejak munculnya pemikiran baru dari tokoh ekonomi Jhon M.Keynes dengan judul bukunya “ The General Theory of Employment, Interest and Money ” yang terbit pada tahun 1936 muncullah apa yang disebut aliran “ Keynesian ”. sebenarnya Keynes sendiri tidak melahirkan analisis ekonomi bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang, sebab perhatiannya terpusat pada keadaan jangka pendek yang tengah dihadapi dunia pada waktu itu yaitu keadaan depresi dan pengangguran.

Salah satu teori dari aliran Keynesian adalah teori Harrod Domar (Bintoro Tjokroamidjojo,1984:35). Menurut Harrod Domar, pembentukan modal dipandang sebagai pengeluaran yang akan menambah kesanggupan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang, sekaligus juga sebagai pengeluaran yang akan menambah permintaan efektif seluruh masyarakat. Penanaman modal yang dilakukan masyarakat dalam suatu waktu tertentu akan digunakan untuk dua tujuan : (1) mengganti alat-alat modal yang tidak dapat dipergunakan lagi, (2) untuk memperbanyak jumlah alat-alat modal dalam masyarakat.

Setelah aliran Keynesian, kemudian muncul aliran Neo Klasik. Apabila di dalam teori Harrod Domar dikemukakan bahwa tingkat pengeluaran akan menentukan laju pertumbuhan ekonomi, maka dalam aliran Neo Klasik dinyatakan bahwa hal tersebut tidak akan menentukan laju pertumbuhan. Menurut aliran Neo Klasik, laju pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh penambahan dalam penawaran faktor-faktor produksi dan tingkat kemajuan teknologi. Teori ini berpangkal pada asumsi “ perekonomian akan tetap mengalami tingkat kesempatan kerja penuh dan kapasitas alat-alat modal akan tetap sepenuhnya digunakan dari masa ke masa “ (Bintoro Tjokroamidjojo,1984:36).

Dari keseluruhan teori pertumbuhan ekonomi yang telah dipaparkan, semuanya menekankan pentingnya pembentukan modal/investasi. Hal ini sejalan dengan pandangan Roe L.Jhons dan Edgar L.Morphet (1975:92), yang mengatakan “ the economi of a country is developed through the formation of capital ”. Dengan demikian, pembentukan modal merupakan salah satu syarat penting dalam pertumbuhan ekonomi.

6. Pembangunan Ekonomi Indonesia

Pembangunan ekonomi di Indonesia dilaksanakan dalam kerangka pembangunan nasional yang menganut prinsip kesemestaan, artinya pembangunan bersifat komprehensif mencakup seluruh segi kehidupan masyarakat.

Pada masa Orde Baru, pembangunan nasional dilaksanakan secara bertahap dalam jangka panjang yang dimulai sejak 1 April 1969. Program pembangunan jangka panjang ini dibagi-bagi menjadi tahapan-tahapan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Jika tidak terjadi perubahan sistem pemerintahan, saat ini Indonesia berada dalam era Pembangunan Jangka Panjang Tahap kedua, dalam kurun waktu 1994 – 2019.

Bila data-data statistik pada masa Orde Baru dapat dipercaya, maka pertumbuhan ekonomi pada era PJPT I dapat dikatakan berhasil. Jika pada awal PJPT I (tahun 1969), pendapatan per kapita penduduk Indonesia hanya US \$ 70, maka pada akhir PJPT I (tahun 1993) sudah mencapai US \$ 700, bahkan pada tahun 1997 sebelum terjadi krisis ekonomi sudah mencapai angka US \$ 1300. Hal ini merupakan keberhasilan yang cukup fantastis, sehingga Indonesia digolongkan negara “ High Performing Asian Economics ”, menyertai negara-negara lainnya di Asia seperti Jepang, China, Hongkong, Korea Selatan, Singapura, Malaysia, Thailand.

Jika dilihat dari angka-angka Produk Domestik Bruto (PDB), pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang periode 25 tahun (PJPT I), tergolong ekonomi tinggi (Dumairy,1997:40). Pertumbuhan ekonomi selama kurun waktu tersebut rata-rata sebesar 6.8 % per tahun. Kunci keberhasilan pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut adalah “ investasi yang tinggi melebihi investasi rata-rata negara di dunia ”. Selain investasi asing, investasi dalam negeri ternyata lebih besar, berkat adanya kredit perbankan.

Lebih lanjut Dawam Raharjo (1996:3-4) menuturkan bahwa selain investasi yang tinggi faktor yang turut menentukan keberhasilan pertumbuhan ekonomi selama PJPT I itu meliputi : (1) tersedianya prasarana fisik berkat pembangunan, jalan, jembatan, bendungan, irigasi pengolahan lahan pertanian, pabrik-pabrik dan gedung-gedung yang mewadahi lembaga-lembaga ekonomi ; (2) meningkatnya mutu SDM karena pembangunan pendidikan. Sekalipun tidak menjadi prioritas sejalan Pelita I sampai V, namun anggaran pendidikan berada dalam urutan 5 atau ke 4 dari besarnya anggaran sektoral.

Menurut Dawam Rahardjo (1996:4), selain pendidikan formal, pendidikan non-formal pun turut menentukan peningkatan kualitas SDM pada masa PJPT I. Berbagai latihan telah dilakukan untuk meningkatkan kemampuan pegawai negeri, manajer KUD, pengrajin, wanita dan pemuda, yang dilakukan oleh berbagai departemen. Demikian pula tidak kurang pentingnya pendidikan dalam bentuk penyuluhan, misalnya melalui program BIMAS kepada petani dan penyuluhan kepada pengrajin industri kecil dan kerajinan rumah tangga. Sementara itu, di lingkungan perusahaan, peningkatan SDM, terutama bersumber pada lulusan pendidikan formal. Pada masa PJPT I, lulusan perguruan tinggi meningkat pesat baik lulusan universitas maupun akademi, walaupun pada kenyataannya masih terdapat “ mis-match ”. Namun hasil pendidikan umum di perguruan tinggi tersebut bisa fleksibel, karena adanya berbagai pelatihan yang diselenggarakan oleh berbagai departemen dan perusahaan-perusahaan swasta.

Kelemahan yang sangat mendasar dalam pembangunan pada era PJPT I adalah terbaikannya aspek pemerataan atau keadilan ekonomi. Menurut Dumairy (1997), pada waktu PJPT I dirancang, strategi pembangunan Indonesia bertumpu pada aspek

pertumbuhan. Sasaran pembangunan diarahkan pada untuk pencapaian pertumbuhan yang tinggi dengan prinsip efisiensi sebagai basis pijakannya. Sekalipun aspek pemerataan ini sempat diperhatikan, yakni mulai Pelita III, namun inti tumpuan pembangunan tetap saja pada pertumbuhan dan bukan pemerataan. Karena pertumbuhan senantiasa menjadi tumpuan pembangunan, maka tidak mengherankan jika aspek pemerataan atau keadilan menjadi terabaikan.

Lebih lanjut Dumairy menjelaskan bahwa ditumpukannya strategi pembangunan pada aspek pertumbuhan, bukanlah tanpa alasan. Secara akademik, strategi pertumbuhan telah memiliki teori-teori yang mantap dalam konsep pembangunan ekonomi. Sementara itu, gagasan-gagasan mengenai pemerataan masih bersifat embrional, belum memiliki kerangka analisis yang mantap dan mapan seperti halnya teori-teori pertumbuhan. Atas dasar itu, tidak mengherankan jika para perencana pembangunan, lebih memusatkan rancangan pembangunannya pada aspek pertumbuhan.

Selain itu, menurut Sritua Arief (1978), pelaksanaan suatu strategi pertumbuhan dan pemerataan (redistribusi) hanya akan efektif bilamana 2 syarat pokok ini bisa dipenuhi :

1. Pembentukan administrasi pemerintahan yang bersih, efektif dan berdisiplin pada seluruh tingkat birokrasi pemerintahan.
2. Restrukturisasi masyarakat Indonesia untuk menghilangkan struktur-struktur sosial yang menghimpit massa rakyat.

Kedua syarat pokok tersebut sampai sekarang belum bisa dipenuhi, sehingga mengakibatkan program-program pemerataan tidak efektif. Sekedar gambaran, Sritua Arief (1978), mengemukakan hasil penelitian J. Danny Zacharias tentang pelaksanaan

program-program pembangunan seperti BIMAS, Proyek Padat karya dan Subsidi Desa. Hasil penelitian tersebut memberikan gambaran :

1. Para Lurah dan kelompoknya yaitu para pamong desa adalah pihak-pihak yang sebagian besar menguasai fasilitas BIMAS.
2. Di dalam pelaksanaan padat karya, yakni proyek penyediaan kesempatan kerja kepada buruh tani di daerah minus pada musim kemarau, Lurah yang berfungsi sebagai pengawas, dalam kenyataannya tidak memberikan pekerjaan kepada golongan buruh tani, tetapi banyak pekerjaan diberikan kepada orang-orang dari kelompoknya. Pemotongan-pemotongan pembayaran terhadap buruh tani oleh Lurah bekerjasama dengan Camat adalah merupakan kenyataan di desa-desa.
3. Subsidi desa yang bertujuan untuk memperbaiki sarana produksi, pemasaran dan perhubungan banyak dimanfaatkan oleh Lurah dan kelompoknya.
4. Sebelum program pembangunan memasuki desa, Lurah dan keluarganya atau kelompoknya, telah tumbuh sebagai suatu kelompok kuat, baik secara ekonomi, sosial maupun politik. Kedudukan ini diperkuat lagi dengan program-program pembangunan yang memasuki desa melalui Lurah. Hal ini telah menyebabkan manfaat-manfaat kesempatan kerja dan peningkatan produksi petani sebagian besar dinikmati oleh Lurah dan kelompoknya.

Sritua Arief (1978), telah menunjukkan pula bahwa dalam proses pertumbuhan ekonomi diwarnai oleh pola tingkah laku penguasa dan keseluruhan birokrasi pemerintah yang tidak wajar, sehingga menimbulkan distorsi-distorsi dalam jalannya proses ekonomi. Distorsi-distorsi tersebut antara lain :

1. Penghisapan parasitis atas sumber-sumber nasional oleh pihak-pihak dari sentrum kekuasaan dan dari keseluruhan birokrasi pemerintah dan perusahaan-perusahaan negara. Penghisapan parasitis atas sumber-sumber nasional ini, ditanggung oleh sebagian besar massa rakyat. Pungutan-pungutan yang tak wajar dan memberatkan, menimbulkan beban yang tidak wajar kepada unit-unit ekonomi yang dikenai pungutan-pungutan ini. Kemudian pungutan-pungutan yang tidak wajar ini oleh unit-unit ekonomi terpaksa dibebankan kepada konsumen barang dan jasa, yang mengakibatkan harga barang dan jasa menjadi lebih mahal dari yang seharusnya.
2. Proses monopolisasi kesempatan dan fasilitas oleh kelompok-kelompok pengusaha swasta yang bekerjasama dengan orang-orang dari pusat kekuasaan dan birokrasi pemerintah. Fenomena ini kemudian ,menimbulkan pemberian dispensasi dan hak-hak istimewa tertentu bagi perusahaan-perusahaan yang terbentuk atas hasil kerjasama ini,sehingga persaingan menjadi tidak sehat. Monopoli fasilitas dan kesempatan ini telah mengakibatkan proses manfaat ekonomi jatuh kepada segelintir orang saja.

TUGAS MANDIRI

Setelah mempelajari modul 7 tentang pembangunan/pertumbuhan ekonomi, kerjakanlah soal-soal berikut ini.

1. Mengapa GNP per kapita sebagai ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi seringkali menyesatkan ? Jelaskan !
2. Mengapa program-program pemerintah Indonesia yang ditujukan untuk masyarakat miskin dalam rangka pemerataan pendapatan seringkali tidak efektif. Jelaskan dan berikan contoh kasusnya di lingkungan saudara !

MODUL 8

KONSUMSI, TABUNGAN DAN INVESTASI

Setelah mempelajari modul 8 ini diharapkan dapat memahami kegiatan menggunakan (konsumsi), dan secara khusus diharapkan dapat :

1. Mendefinisikan konsumsi
2. Menjelaskan cara mengatur ekonomi rumah tangga
3. Menjelaskan pentingnya tabungan
4. Menjelaskan pentingnya investasi

A. Pengertian Konsumsi

Seperti telah dijelaskan dimuka (modul 3) bahwa kegiatan ekonomi yang dilakukan dalam kehidupan dapat dibedakan menjadi tiga yakni, konsumsi, produksi dan distribusi. Dari ketiga kegiatan itu, kegiatan konsumsi dilakukan oleh Rumah Tangga Konsumsi atau konsumen sebagai pelaku ekonomi.

Rumah Tangga Konsumsi adalah manusia secara individual atau manusia sebagai anggota masyarakat atau keluarga yang melakukan kegiatan konsumsi. Dalam hal ini yang dimaksud konsumsi adalah tindakan dalam mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang, baik secara sekaligus maupun bertahap. Sebagai contoh, memakan pisang berarti menghabiskan kegunaan pisang. Setiap kali siswa duduk di bangku sekolah, ia melakukan tindakan konsumsi, sebab bangku tersebut berangsur-angsur berkurang kegunaannya, sampai akhirnya rusak. Demikian pula konsumsi terjadi pada barang modal seperti halnya mesin di pabrik yang sering digunakan berulang kali sehingga menjadi aus dan rusak (terjadi penyusutan).

Tindakan konsumsi yang dilakukan oleh rumah tangga yang satu dengan rumah tangga yang lainnya bisa berbeda-beda. Hal ini tergantung pada gaya hidupnya, lingkungannya dan tingkat pendapatannya. Gaya hidup yang boros, lingkungan yang konsumtif, akan mempengaruhi pola konsumsinya. Demikian pula tingkat pendapatan, berapa besar bagian dari pendapatan yang digunakan untuk konsumsi, sangat tergantung pada jumlah pendapatan yang bisa diperoleh. Sehubungan dengan hal ini, Engel, seorang ahli ekonomi Jerman, mengemukakan hubungan antara pendapatan dan konsumsi sebagai berikut “ **semakin kecil pendapatan, semakin besar bagian dari pendapatan itu yang digunakan untuk konsumsi dan sebaliknya** ”. Karena itu pokok permasalahan yang dihadapi oleh setiap rumah tangga konsumsi adalah bagaimana mengusahakan agar dengan pendapatan yang diperoleh dapat memenuhi semua kebutuhannya. Dengan kata lain bagaimana cara menjaga keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran.

B. Mengatur Ekonomi Rumah Tangga

Pengolahan konsumsi yang realistis, pada dasarnya berkaitan dengan cara bertindak ekonomis yaitu sikap hemat, berencana, bersedia mengubah sikap boros.

Dalam rangka mengelola ekonomi rumah tangga kita harus berupaya agar :

1. Mampu mengatur pengeluaran sesuai dengan kondisi keuangan dan rencana yang telah disusun.
2. Mampu mengadakan pilihan atau seleksi kebutuhan-kebutuhan kita sesuai dengan intensitasnya.
3. Mampu mengadakan tabungan (saving) untuk merealisasikan kebutuhan-kebutuhan yang direncanakan.

4. Mampu mengatur keuangan sedemikian rupa sehingga tidak berutang, kecuali dalam keadaan yang sangat terpaksa.

Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah :

1. Membentuk catatan tentang semua pengeluaran dan penerimaan. Inilah langkah pertama dalam mengatur keuangan keluarga, yakni membuat catatan tentang semua pengeluaran dan penerimaan uang dengan lengkap. Pengeluaran dapat dirinci untuk berbagai keperluan seperti belanja dapur, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, rekreasi, dan sebagainya.
2. Menyusun anggaran belanja rumah tangga. Berdasarkan catatan tersebut diatas, kita dapat menyusun anggaran belanja keluarga, yakni suatu rencana yang disusun secara rinci mengenai penghasilan dan pengeluaran untuk kebutuhan-kebutuhan rumah tangga dalam waktu tertentu, misalnya satu bulan. Dalam hal ini yang yang perlu diperhatikan adalah :
 - a. Membuat perhitungan /taksiran jumlah penerimaan dalam bulan yang akan datang
 - b. Membuat daftar kebutuhan untuk satu bulan
 - c. Memperkirakan harga-harga kebutuhan masing-masing
 - d. Membandingkan antara penghasilan yang sebenarnya dengan pengeluaran yang sebenarnya
 - e. Melihat hasil perbandingan pada akhir bulan, mana pos-pos yang perlu ditambah atau dikurangi.

3. Membuat kebijaksanaan dalam pengeluaran uang

Kita harus selalu menjaga keseimbangan antara pengeluaran dengan penghasilan.

Bila pengeluaran lebih besar daripada penghasilan, maka harus ada pos-pos pengeluaran yang ditekan/dikurangi sehingga bisa sesuai dengan pendapatan. Dengan kata lain, kita harus mengadakan seleksi terhadap kebutuhan, mana yang pokok, mana yang kurang penting dan ditunda, mana yang bisa dikurangi atau diganti dengan barang lain yang lebih murah.

4. Mengusahakan tambahan penghasilan

C. Tabungan (Saving)

Seperti telah disinggung di atas, untuk menghadapi pemuasan kebutuhan di masa yang akan datang, kita harus merencanakannya dari sekarang dengan jalan menyisihkan sebagian dari pendapatan untuk tidak dikonsumsi. Bagian pendapatan yang tidak dikonsumsi ini disebut tabungan atau saving. Namun, tidak semua bagian pendapatan yang tidak dikonsumsi dapat digolongkan sebagai tabungan, sebab motif untuk menabung adalah untuk mengadakan investasi. Dengan demikian, menyimpan sejumlah uang di rumah dalam “ celengan “ dengan tujuan untuk membeli barang dan jasa di masa yang akan datang, tidak dapat digolongkan sebagai tabungan. Dalam ilmu ekonomi simpanan yang demikian disebut “ hoarding “ . Demikian pula membeli perhiasan mas dengan tujuan untuk dijual kembali bilamana memerlukan uang, tindakan ini digolongkan sebagai “ hoarding “

Simpanan dalam bentuk “ hoarding “ sebagaimana dicontohkan di atas, memang bermanfaat bagi mereka yang melakukannya. Namun, tidak bermanfaat bagi masyarakat luas, terutama investor. Lain halnya, jika masyarakat menyimpan bagian pendapatan yang tidak dikonsumsi tersebut di Bank, yang kemudian oleh Bank disalurkan dalam bentuk kredit kepada para investor. Simpanan masyarakat ini sangat bermanfaat bagi

pembentukan modal yang akan digunakan oleh para investor. Bentuk simpanan seperti inilah yang disebut sebagai tabungan (saving).

D. Investasi

Investasi atau penanaman modal adalah tambahan barang-barang modal atau barang-barang produksi (mesin, pabrik, dsb.) dalam suatu masa tertentu. Investasi ini dapat tercipta bilamana ada tabungan.

Besar kecilnya investasi yang dilakukan oleh pengusaha dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut ini.

a. Tingkat bunga

Dalam hal ini meskipun seorang pengusaha memiliki modal yang cukup besar, belum tentu ia melakukan kegiatan investasi. Sebab keputusan pengusaha untuk mengadakan investasi dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Jika tingkat suku bunga lebih tinggi dari tingkat keuntungan yang akan diperolehnya, maka pengusaha tersebut akan memilih menyimpan uangnya di bank daripada melakukan investasi. Sebaliknya, jika tingkat suku bunga lebih rendah daripada tingkat keuntungan yang akan diperolehnya, maka pengusaha tersebut akan memilih investasi. Demikian pula pengusaha tersebut akan memiliki keberanian untuk memperoleh kredit bank untuk menambah modal usahanya, jika keuntungan yang akan diperoleh lebih besar daripada bunga yang harus dibayarnya kepada bank.

b. Tingkat keuntungan

Investasi yang dilakukan oleh pihak swasta memiliki motif untuk mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya. Karena itu, keuntungan yang diperoleh merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi investasi. Keuntungan yang tinggi

merupakan suatu petunjuk bahwa perusahaan tersebut sedang mengalami perkembangan dalam permintaan produknya. Agar permintaan yang berkembang itu dapat dipenuhi di masa yang akan datang, maka investasi baru harus dilakukan antara lain menambah mesin-mesin, mendirikan pabrik baru, dsb.

c. Prediksi (ramalan) tentang masa depan

Suatu ramalan atau prediksi tentang keadaan di masa depan, apakah perekonomian akan semakin membaik atau bahkan terdapat tanda-tanda kemunduran, akan mempengaruhi keputusan investasi. Ramalan yang menunjukkan bahwa keadaan perekonomian akan lebih baik di masa mendatang, akan mendorong pertumbuhan investasi.

Ditinjau dari siapa yang mengadakan investasi, dapat dibedakan dua jenis investasi sebagai berikut.

a. Investasi Swasta (Private Investment)

Investasi ini dilakukan oleh pihak swasta dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Investasi ini biasanya didorong oleh meningkatnya daya beli masyarakat.

b. Investasi Pemerintah (Public Investment)

Investasi pemerintah dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan bukan untuk memperoleh keuntungan. Investasi ini dalam bentuk pembangunan jalan raya, pelabuhan, irigasi, rumah sakit, dsb.

Selain bentuk investasi fisik sebagaimana yang telah diuraikan di atas, sesungguhnya masih ada bentuk investasi lain seperti investasi sumber daya manusia (human investment), seperti program pendidikan dan pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Para ahli ekonomi telah mengakui pentingnya

investasi sumber daya manusia ini, sebab memiliki sumbangan yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

TUGAS MANDIRI

Setelah mempelajari modul 8 tentang konsumsi, tabungan dan investasi, kerjakanlah soal-soal berikut ini.

1. Adakah persamaan dan perbedaan antara tabungan dengan hoarding ? Jelaskan !
2. Di negara sedang berkembang, pembentukan modal melalui tabungan relatif sulit dilakukan. Mengapa ?

DAFTAR PUSTAKA (MODUL 5 – 8)

- Abdullah,N.S.1987. **Pengantar Ilmu Ekonomi**, Bandung : Forum Pengkajian & Pengembangan Pendidikan Ekonomi, FPIPS IKIP Bandung.
- Ace Partadiredja.1982. **Pengantar Ekonomika**, Yogyakarta : BPFE
- Becker, Gary.S.1993.**Human Capital**, The University Chicago Press
- Bintoro Tjokroamidjojo.1984.**Teori & Strategi Pembangunan Nasional**, Jakarta : Gunung Agung.
- Carla Poli.1992. **Pengantar Ilmu Ekonomi I**, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Dawam Rahardjo.1996.**Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi**. Makalah pada Seminar Nasional Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
- Dumairy.1997. **Perekonomian Indonesia**, Jakarta : Erlangga.
- Jhingan,M.L.1996. **Ekonomi Pembangunan**, Jakarta : Grafindo Persada
- Sadono Sukirno.1981.**Ekonomi Pembangunan**, Medan : Borta Gorat
- Sritua Arief.1978. Indonesia : **Pertumbuhan Ekonomi, Disparitas Pendapatan dan Kemiskinan Massal**, Jakarta : Lembaga Studi Pembangunan.
- Winardi.1976.**Pengantar Teori Politik Ekonomi**, Bandung : Alumni

